

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. MAGETAN



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGETAN

JL. TRI PANDITA NO 17 MAGETAN | 0351-895049

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	22
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	41
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	47
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	52
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	53
3.3 Program dan Kegiatan.....	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	68
BAB V PENUTUP.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diterbitkannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang system perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menjadi acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, maupun daerah dengan daerah

Konsekuensinya adalah dituntut adanya paradigma perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan Tindak lanjutnya adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

Rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disebut rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – OPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai arti yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2023.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana Capaian Kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2023. Ini merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah diterapkan dalam perencanaan strategis (Renstra).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang PeUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);rubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 08 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Taun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 16)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan selaras dengan maksud dan tujuan Rencana Strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Magetan.
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Magetan.
- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan

Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS)
Tahun 2023

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH		
BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
1.3	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah
1.4	Sistematika Penulisan	Berisi tentang sistematika penyajian/ penyusunan Renja Perangkat Daerah
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	Memuat hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun n-2 dan perkiraan capaian tahun n-1, dikaitkan dengan target capaian renstra
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK)
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah lainnya	Berisikan permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang dalam pelayanan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta isu-isu strategis
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para masyarakat, dan pengumpulan informasi dari pengamatan lapangan
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		

3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (pencapaian IKU dan IKD tahun direncanakan)
3.3	Program dan Kegiatan	Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun direncanakan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		
	Memberikan informasi program & kegiatan tahun rencana, target capaian kinerja beserta pagu indikatifnya	
BAB V PENUTUP		
	Berisikan hal-hal penting lainnya dianggap perlu Juga dicantumkan tanggal, nama Kepala Perangkat Daerah dan stempel	

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2022 merupakan tahun Keempat dalam periode Renstra tahun 2019-2023. Oleh karena itu, pada sub bab ini hanya akan diuraikan proyeksi capaian pelaksanaan Renja Tahun 2021 untuk mengetahui progres capaian sasaran Renstra tahun 2019-2023.

Proyeksi terhadap hasil pelaksanaan Renja DISPERINDAG adalah sebagai berikut :

Tabel Monev Renja SKPD Tribulan IV Tahun 2021

Tabel Monev Renja SKPD Tribulan II Tahun 2022

Tabel Monev Renja SKPD Tribulan IV Tahun 2021

Tabel T-C.29																
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021																
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB MAGETAN																
Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
			Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau %	46	%	2,773,000,000									208.6956822	11.2513592	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.1.1	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah/Jenis Barang yang dipantau unit	20	unit	540,000,000									15	18.0176463	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.1.2	Operasionalisasi dan pengembangan UPTI kemetrologian daerah	Jumlah UTPP yang ditera unit	28000	unit	2,028,000,000									42.2428571	10.5871741	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.1.3	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Perdagangan	Persentase Pelaksanaan kegiatan DAK Perdagangan %	0	0	0									#REF!	#REF!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.1.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perdagangan	Jumlah Pedagang yang diberikan sosialisasi Pedagang	300	pedagang	205,000,000									0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.1.5	Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal		0	0	0									#REF!	#REF!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah UTPP Yang Ditera	46	%	295,000,000	100	%	85,000,000	100	%	84,835,050	100.00	99.81	216.97	29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTPP yang ditera	46	%	295,000,000	8000	unit	85000000	10	unit	84,835,050	0.13	99.81	21.80	29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTPP yang ditera	28000	unit	295,000,000	8000	unit	85,000,000	#REF!	unit	84,835,050	#REF!	99.81	36	29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06.2.01.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTPP yang ditera							#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.2	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pelaku usaha perdagangan unit	10163	unit	4,455,000,000									64.9512939	11.7165854	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.2.1	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah Pelaksanaan pasar murah dan pujasera Kali	30	kali	930,000,000									10	16.5415161	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.2.2	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Jumlah fasilitasi UKM /pedagang IKM	140	ikm	220,000,000									0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.2.3	Pengembangan pasar lelang daerah	Jumlah UKM yang difasilitasi untuk mengikuti pasar lelang dan misi dagang. Pedagang	176	pedagang	470,000,000									0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.2.4	Peningkatan Sistem dan Jaringan Perdagangan (uji coba pasar)	Jumlah monitoring harga sembako Kali	260	kali	135,000,000									20	18.4407407	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.2.5	Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan pameran Kali	60	kali	2,700,000,000									15	12.7126955	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	54	%	457,500,000	54	%	90,000,000	85	%	59,749,200	157.41	66.39	123	13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau/persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi	54	%	374,500,000	100	%	70,000,000	85	%	59,749,200	85.00	85.36	158	16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah/Jenis Barang yang dipantau	3	unit	52,000,000	1	unit	10,000,000	2	unit	9,894,000	200.00	98.94	67	19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah monitoring harga sembako	156	kali	72,500,000	52	kali	20,000,000	52	kali	9,894,600	100.00	49.47	33	14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan pasar murah dan pujasera Kali	7	kali	250,000,000	1	kali	40,000,000	1	kali	39,960,000	100.00	99.90	14	16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau/persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi	100	%	83,000,000	100	%	20,000,000	100	%	19,999,500	100.00	100.00	100	24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi	Jumlah/Jenis Barang yang dipantau	8	unit	83,000,000	2	unit	20,000,000	2	unit	19,999,500	100.00	100.00	25	24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pelaksanaan Pameran	90	%	310,000,000	90	%	0	-	-	-	-	-	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan pameran	36	kali	310,000,000	12	kali	0	-	kali	-	-	-	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaksanaan pameran	36	kali	310,000,000	0	kali	0	-	kali	-	-	-	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaksanaan pameran							#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaku usaha perdagangan	80	%	399,000,000	80	%	75,000,000	86	%	64,496,000	107.50	85.99	107.49	16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku usaha perdagangan	80	%	399,000,000	80	%	75,000,000	86	%	64,496,000	107.50	85.99	107.49	16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB MAGETAN

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
			Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pameran	21	kali	315,000,000	5	kali	65,000,000	5	kali	54,940,000	100.00	84.52	24	17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas UKM /pedagang	60	ikm	84,000,000	20	ikm	10,000,000	20	ikm	9,556,000	100.00	95.56	33	11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.3	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Cakupan PK5 yang dibina dan didata %	8.3	%	640,000,000									36.1445783	29.8075078	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.3.1	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah pedagang yang memperoleh pembinaan dan pendataan Pedagang	2000	pedagang	460,000,000									10.25	37.7734891	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.3.2	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	Jumlah Pedagang yang diawasi mutu dagangannya Pedagang	300	pedagang	180,000,000									28	9.45	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.4	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Bidang Perdagangan	persentase peredaran barang kena cukai ilegal yang terpantau %	0	%	550,000,000									#DIV/0!	17.3451727	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.4.1	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai Kali	Jumlah monitoring hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai Kali	60	kali	550,000,000									20	17.3451727	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5	Program Peningkatan Pasar Daerah	Persentase bangunan dan sarana penunjang pasar dalam kondisi baik %	75	%	44,720,000,000									121	20.9272530	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.1	Operasionalisasi Pasar	Jumlah Penyediaan biaya Operasional sarana dan prasarana pasar Bulan	60	bulan	6,950,000,000									20	18.5951619	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.2	Rehabilitasi Pasar	Jumlah Pasar yang di rehabilitasi unit	12	unit	23,000,000,000									75	31.1727866	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.3	Pembangunan Pasar Hewan	Jumlah Pasar Hewan yang dibangun unit	7	unit	14,000,000,000									0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.4	Revitalisasi Pasar (DAK)		0	unit	0									#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.5	Peningkatan Sumberdaya Pasar Daerah	Jumlah penyusunan dokumen pemetaan pasar daerah; dokumen	2	dokumen	200,000,000									0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.6	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Pasar	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan DAK Bidang Pasar %	100	%	100,000,000									50	10.2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.7	Pemeliharaan Gedung Pasar	Jumlah pasar yang dipelihara unit	8	unit	400,000,000									50	48.3192350	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.8	Pemeliharaan Pasar Hewan	Jumlah pasar hewan yang dipelembaga unit	15	unit	70,000,000									6.6666667	28.2383571	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi	80	%	24,681,469,000	80	%	9,281,468,944	89	%	8,280,745,908	111.52	89.22	111.52	34	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi	80	%	24,507,875,000	80	%	9,245,374,944	90	%	8,280,745,908	111.96	89.57	112	34	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direhabilitasi dan dipelihara	16	unit	22,292,100,000	5	unit	8,631,599,944	11	unit	7,683,222,208	220.00	89.01	69	34	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03.2.01.02	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah penyediaan biaya operasional sarana dan prasarana pasar	36	bulan	2,215,775,000	12	bulan	613,775,000	12	bulan	597,523,700	100.00	97.35	33	27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan sarana distribusi	80	%	173,594,000	80	%	36,094,000	100	%	36,094,000	125.00	100.00	125	21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang memperoleh pembinaan dan pendataan	150	pk5	173,594,000	25	pk5	36,094,000	60	pk5	36,094,000	240.00	100.00	40	21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Bidang Perdagangan	persentase peredaran barang kena cukai ilegal yang terpantau (%)	0	%	550,000,000									#REF!	#REF!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau (%)	75	%	232,500,000	75	%	0	-	%	-	-	-	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	75	%	232,500,000	75	%	0	-	%	-	-	-	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau										#DIV/0!	#DIV/0!	#REF!	#REF!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	36	kali	232,500,000	0	kali	0	-	kali	-	-	-	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.1	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Persentase Industri Kecil yang mendapatkan implementasi iptek sistem produksi %	90	%	2,630,000,000									107.7777778	10.8084774	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.1.1	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Jumlah Industri Kecil yg memperoleh sertifikat HKI/merk, Halal, Uji Nutrisi dan Design Kemasan IKM	185	ikm	1,075,000,000									19.45945946	8.486842419	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.1.2	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Jumlah Industri Kecil yang mendapatkan pengembangan tentang manajemen teknologi industri IKM	190	ikm	825,000,000									13.15789474	11.87471515	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.1.3	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah Kelompok Industri Kecil yang mendapatkan pembinaan, diklat dan bantuan peralatan IKM	200	ikm	730,000,000									10	13.02232877	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri Kecil yang mendapatkan implementasi iptek												0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB MAGETAN

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	
			Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota															DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.03.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang memperoleh sertifikat HKI/merk, Halal, Uji Nutrisi dan design Kemasan														DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.1.2	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase Perkembangan Pelaku Usaha Industri %	90	%	1,325,000,000								86.6666667		26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.1.2.1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah Industri Kecil yang mendapat pembinaan, bantuan peralatan dan uji coba produk IKM	142	ikm	1,325,000,000								21.1267606		26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.1.3	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Persentase Industri Kecil yang menerapkan teknologi industri %	100	%	3,335,000,000								96		13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.1.3.1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah Industri Kecil yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan IKM	460	ikm	1,350,000,000								3.2608696		10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.1.3.2	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah kelompok Industri Kecil yang mendapatkan fasilitasi pengembangan dan pelayanan teknologi melalui bimtek dan bantuan sarana prasarana IKM	40	ikm	1,480,000,000								137.5000000		16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.1.3.3	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Jumlah Industri Kecil yang mendapatkan sosialisasi standart produksi dan fasilitasi perolehan SNI dan HKI IKM	200	ikm	250,000,000								30.0000000		19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.1.3.4	Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur	Jumlah Industri Kecil yang mengikuti sosialisasi standarisasi IKM	160	ikm	255,000,000								0.0		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perkembangan pelaku usaha industri	90	%	19,257,890,730	90	%	5,685,534,000	80	%	4,559,344,556	89.10	80.19	89.10	24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek, Persentase Perkembangan pelaku usaha industri, Persentase industri kecil yang menerapkan teknologi industri, Jumlah sentra industri kecil yang berkembang	90	%	19,257,890,730	90	%	5,685,534,000	80	%	4,559,344,556	89.10	80.19	89	24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah kelompok industri yang mendapatkan pembinaan dan bantuan peralatan	15	ikm	471,600,000	15	ikm	916,600,000	36	ikm	909,268,650	240.00	99.20	240	193	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pengembangan tentang teknologi industri										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek, Persentase Perkembangan pelaku usaha industri, Persentase industri kecil yang menerapkan teknologi industri, Jumlah sentra industri kecil yang berkembang	180	ikm	18,626,500,000	25	ikm	918,564,000	42	ikm	913,524,606	168.00	99.45	23	5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek, Persentase Perkembangan pelaku usaha industri, Persentase industri kecil yang menerapkan teknologi industri, Jumlah sentra industri kecil yang berkembang	175	ikm	4,790,730	1	ikm	3,800,370,000	1	ikm	2,736,551,300	100.00	72.01	1	57,122	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen pengumpulan data industri	3	dokumen	155,000,000	1	dokumen	50,000,000	-	dokumen	-	-	-	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.1.4	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah Sentra Industri Kecil yang berkembang sentra	10	sentra	240,000,000									0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.1.4.1	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah sentra industri potensial yang dilakukan pendataan Industri Kecil sentra	50	sentra	240,000,000									0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.1.5	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	persentase Kelompok alih profesi yang dibina dan berikan bantuan produksi %	100	%	6,115,000,000									54		12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.5.1	Pembinaan dan Pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah kelompok yang dibina dan dilatih kelompok	40	kelompok	2,305,000,000									23		21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.5.2	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat / Kelompok Masyarakat	Jumlah kelompok yang diberikan bantuan sarana produksi kelompok	37	kelompok	990,000,000									8.1081081		15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.5.3	Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri Masyarakat	Fasilitasi Pameran produk kerajinan dan hasil pelatihan kelompok	73	kelompok	820,000,000									38.3561644		16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.5.4	Pembangunan Rehabilitasi / Pemeliharaan Pasar	Jumlah Pasar yang dipelihara/rehab unit	4	unit	2,000,000,000									0		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase Industri kecil yang dibina dan berikan bantuan produksi (%)	90	%	1,200,000,000	90	%	300,000,000	81	%	244,189,750	90.44	81.40	90.44	20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelompok alih profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi	90	%	1,200,000,000	90	%	300,000,000	81	%	244,189,750	90.44	81.40	90	20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase kelompok alih profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi	220	ikm	837,000,000	0	ikm	0	-	ikm	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB MAGETAN

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2021 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
			Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINas	Persentase kelompok ahli profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi	300	ikm	363,000,000	100	%	300,000,000	81	%	244,189,750	81.40	81.40	27	67	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.6	Program penataan struktur industri	Luas pembebasan lahan untuk pembangunan LIK II Ha	5	ha	5,000,000,000									0	0.9609750	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.6.1	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Luas Lahan yang dibebaskan Ha	5	ha	5,000,000,000									20	0.9609750	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat Skor	77.5	skor	3,845,280,000									99.9716129	14.399367068	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase jumlah pelaksanaan penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran %	100	%	2,875,280,000									92	15.284996174	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase jumlah pelayanan Perjalanan dinas %	100	%	855,000,000									100	11.057303392	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.1.3	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat dokumen	5	dokumen	115,000,000									20	17.104	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka	75	skor	27,756,844,530	75	skor	10,280,612,906	77.12	skor	8,543,094,797	102.83	83.10	103	31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	99,300,000	75	skor	30,000,000	99	skor	29,686,000	131.94	98.95	132	30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	21	laporan	71,300,000	7	laporan	23,000,000	7	laporan	22,726,000	100.00	98.81	33	32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	18	dokumen	28,000,000	6	dokumen	7,000,000	6	dokumen	6,960,000	100.00	99.43	33	25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	19,582,959,830	75	skor	6,239,606,906	70	skor	5,208,382,823	93.68	83.47	94	27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	6	laporan	14,000,000	2	laporan	3,500,000	2	laporan	3,444,000	100.00	98.40	33	25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100	%	19,568,959,830	100	%	6,236,106,906	83	%	5,204,938,823	83.46	83.46	83	27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	2,746,491,500	75	skor	531,715,000	77	skor	521,858,100	102.83	98.15	103	19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.04.07	Delaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya pelaporan pengelolaan retribusi daerah	100	%	62,000,000	100	%	20,000,000	94	%	18,799,000	94.00	94.00	94	30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya pelayanan pengelolaan retribusi daerah	100	%	2,684,491,500	100	%	511,715,000	98	%	503,059,100	98.31	98.31	98	19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.05	F		75	skor	93,500,000	75	skor	1,390,000,000	77	skor	1,081,693,600	102.83	77.82	103	1,157	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	105	pns	52,000,000	35	pns	10,000,000	35	pns	8,875,000	100.00	88.75	33	17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	78	pns	41,500,000	2	pns	1,380,000,000	22	kali	1,072,818,600	1,100.00	77.74	58	2,585	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	1,288,163,000	75	skor	405,653,000	77	skor	389,963,908	102.83	96.13	103	30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	111,600,000	12	bulan	36,000,000	12	bulan	35,400,000	100.00	98.33	33	32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	88,000,000	12	bulan	25,000,000	12	bulan	24,905,700	100.00	99.62	33	28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	60,760,000	12	bulan	19,600,000	12	bulan	19,600,000	100.00	100.00	33	32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	93,000,000	12	bulan	20,000,000	12	bulan	19,400,000	100.00	97.00	33	21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	48	unit	435,053,000	16	unit	174,053,000	22	unit	165,094,100	137.50	94.85	46	38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	42,500,000	12	bulan	11,000,000	12	bulan	11,000,000	100.00	100.00	33	26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dan pelayanan perjalanan dinas	36	bulan	457,250,000	12	bulan	120,000,000	3	bulan	114,564,108	25.00	95.47	8	25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	3,699,670,200	75	skor	1,583,038,000	77	skor	1,220,760,424	102.82	77.12	103	33	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	792,050,000	12	bulan	200,500,000	12	bulan	107,663,724	100.00	53.70	33	14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	2,845,620,200	12	bulan	1,368,538,000	12	bulan	1,100,850,000	100.00	80.44	33	39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor yang dipelihara	105	unit	62,000,000	35	unit	14,000,000	35	unit	12,246,700	100.00	87.48	33	20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	246,760,000	75	skor	100,600,000	90	skor	90,749,942	120.28	90.21	120	37	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6	unit	139,500,000	2	unit	45,000,000	2	unit	42,139,342	100.00	93.64	33	30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	57	unit	107,260,000	19	unit	55,600,000	19	unit	48,610,600	100.00	87.43	33	45	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					74,590,204,260			25,797,615,850			21,836,455,261	0	84.65	0	29.28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tabel Monev Renja SKPD Tribulan II Tahun 2022

Tabel T-C.29																			
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2022																			
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB MAGETAN																			
Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
			Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau %	46	%	2,773,000,000	96	%	311,999,940									208.695652	11.25135016	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.1.1	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah/Jenis Barang yang dipantau unit	20	unit	540,000,000	3	unit	97,292,050									15	18.0170463	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.1.2	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	Jumlah UPT yang ditera unit	28000	unit	2,028,000,000	11800	unit	214,707,890									42.1428571	10.58717406	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.1.3	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Perdagangan	Persentase Pelaksanaan kegiatan DAK Perdagangan %	0	0	0	0	0	0									#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.1.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perdagangan	Jumlah Pedagang yang diberikan sosialisasi Pedagang	300	pedagar	205,000,000	0	0	0									0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.1.5	Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal		0	0	0	0	0	0									#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah UPTP Yang Ditera	46	%	295,000,000				100	%	135,000,000	42	%	56,559,200	41.90	41.90	91.08	19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UPTP yang ditera	46	%	295,000,000				9018	unit	135000000	11,289	unit	56,559,200	125.18	41.90	24,541	19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UPTP yang ditera	28000	unit	295,000,000				9000	unit	90,000,000	11,279	unit	37,322,400	125.32	41.47	40	13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06.2.01.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UPTP yang ditera							18	ecamata	45,000,000	10	-	19,236,800	55.56	42.75	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.2	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pelaku usaha perdagangan unit	10163	unit	4,455,000,000	6601	unit	521,973,878									64.9512939	11.71658536	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.2.1	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah Pelaksanaan pasar murah dan pujasera Kali	30	kali	930,000,000	3	kali	153,836,100									10	16.54151613	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.2.2	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Jumlah fasilitasi UKM /pedagang IKM	140	ikm	220,000,000	0	ikm	0									0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.2.3	Pengembangan pasar lelang daerah	Jumlah UKM yang difasilitasi untuk mengikuti pasar lelang dan misi dagang. Pedagang	176	pedagar	470,000,000	0	pedagar	0									0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.2.4	Peningkatan Sistem dan Jaringan Perdagangan (uji coba pasar)	Jumlah monitoring harga sembako Kali	260	kali	135,000,000	52	kali	24,895,000									20	18.44074074	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.2.5	Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan pameran Kali	60	kali	2,700,000,000	9	kali	343,242,778									15	12.71269548	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	54	%	457,500,000				54	%	202,500,000	20	%	41,069,250	37.56	20.28	37.56	9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2022

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB MAGETAN

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
			Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau/persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi	54	%	374,500,000				100	%	155,000,000	13	%	20,606,000	13.29	13.29	25	6	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah/Jenis Barang yang dipantau	3	unit	52,000,000				3	unit	20,000,000	2	unit	9,119,450	66.67	45.60	67	18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah monitoring harga sembako	156	kali	72,500,000				52	kali	45,000,000	26	kali	5,332,050	50.00	11.85	17	7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan pasar murah dan pujasera Kali	7	kali	250,000,000				6	kali	90,000,000	-	kali	6,154,500	-	6.84	-	2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau/persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi	100	%	83,000,000				100	%	47,500,000	-	%	20,463,250	-	43.08	-	25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah/Jenis Barang yang dipantau	8	unit	83,000,000				6	unit	47,500,000	3	unit	20,463,250	50.00	43.08	38	25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pelaksanaan Pameran	90	%	310,000,000				90	%	135,000,000	-	-	-	-	-	0	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pameran	36	kali	310,000,000				14	kali	135,000,000	-	kali	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaksanaan pameran	36	kali	310,000,000				12	kali	90,000,000	2	kali	31,404,750	16.67	34.89	6	10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaksanaan pameran							2	kali	45,000,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2022

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB MAGETAN

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp		
			Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaku usaha perdaga	80	%	399,000,000				80	%	265,000,000	31	%	83,393,750	39.34	31.47	39.34	21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku usaha perdaga	80	%	399,000,000				80	%	265,000,000	31	%	83,393,750	39.34	31.47	39	21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pameran	21	kali	315,000,000				8	kali	230,000,000	2	kali	83,393,750	25.00	36.26	10	26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi UKM /pedagang	60	ikm	84,000,000				20	ikm	35,000,000	-	ikm	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
1.1.3	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Cakupan PK5 yang dibina dan didata %	8.3	%	640,000,000	3	%	190,768,050									36.1445783	29.80750781	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
1.1.3.1	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah pedagang yang memperoleh pembinaan dan pendataan Pedagang	2000	pedagang	460,000,000	205	pedagang	173,758,050									10.25	37.77348913	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
1.1.3.2	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	Jumlah Pedagang yang diawasi mutu dagangannya Pedagang	300	pedagang	180,000,000	84	pedagang	17,010,000									28	9.45	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
1.1.4	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal Bidang Perdagangan	persentase peredaran barang kena cukai ilegal yang terpantau %	0	%	550,000,000	0	%	95,398,450									#DIV/0!	17.34517273	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
1.1.4.1	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	Jumlah monitoring hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai Kali	60	kali	550,000,000	12	kali	95,398,450									20	17.34517273	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
1.1.5	Program Peningkatan Pasar Daerah	Persentase bangunan dan sarana penunjang pasar dalam kondisi baik %	75	%	44,720,000,000		%	9,358,667,524										121.3333333	20.92725296	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.1	Operasionalisasi Pasar	Jumlah Peyediaan biaya Operasional sarana dan prasarana pasar Bulan	60	bulan	6,950,000,000	12	bulan	1,292,363,750										20	18.59516187	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.2	Rehabilitasi Pasar	Jumlah Pasar yang di rehabilitasi unit	12	unit	23,000,000,000	9	unit	7,169,740,919										75	31.1727866	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.3	Pembangunan Pasar Hewan	Jumlah Pasar Hewan yang dibangun unit	7	unit	14,000,000,000	0	unit	0										0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.4	Revitalisasi Pasar (DAK)		0	unit	0	3	unit	673,319,065									#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
1.1.5.5	Peningkatan Sumberdaya Pasar Daerah	Jumlah penyusunan dokumen pemetaan pasar daerah; dokumen	2	dokume	200,000,000	0	dokume	0										0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2022
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB MAGETAN

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
			Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan						
1.1.5.6	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Pasar	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan DAK Bidang Pasar %	100	%	100,000,000	50	%	10,200,000									50	10.2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.7	Pemeliharaan Gedung Pasar	Jumlah pasar yang dipelihara unit	8	unit	400,000,000	4	unit	193,276,940									50	48.319235	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.8	Pemeliharaan Pasar Hewan	Jumlah pasar hewan yang dipelihara unit	15	unit	70,000,000	1	unit	19,766,850									6.6666667	28.23835714	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana	80	%	24,681,469,000				80	%	5,792,087,000	18	%	1,050,387,292	22.67	18.13	22.67	4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana	80	%	24,507,875,000				80	%	5,724,587,000	18	%	1,050,387,292	22.94	18.35	23	4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direhabilitasi dan dipelihara	16	unit	22,292,100,000				5	unit	5,049,587,000	-	unit	712,804,781	-	14.12	-	3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah penyediaan biaya operasional sarana dan prasarana pasar	36	bulan	2,215,775,000				12	bulan	675,000,000	6	bulan	337,582,511	50.00	50.01	17	15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan sarana	80	%	173,594,000				80	%	67,500,000	-	%	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang memperoleh pembinaan dan pendataan	150	pk5	173,594,000				50	pk5	67,500,000	-	pk5	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal Bidang Perdagangan	persentase peredaran barang kena cukai ilegal yang terpantau (%)	0	%	550,000,000	0	%	95,398,450									#DIV/0!	17.34517273	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau (%)	75	%	232,500,000				75	%	85,000,000	6	%	5,151,300	8.08	6.06	8.08047059	2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	75	%	232,500,000				75	%	85,000,000	6	%	5,151,300	8.08	6.06	8	2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau							12	kali	35,000,000	2	-	5,151,300	16.67	14.72	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	36	kali	232,500,000				12	kali	50,000,000	-	kali	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2022

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB MAGETAN

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
			Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.1	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Persentase Industri Kecil yang mendapatkan implementasi iptek %	90 %		2,630,000,000	97 %		284,262,956									107.777778	10.80847741	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.1.1	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Jumlah Industri Kecil yg memperoleh sertifikat HKI/merk, Halal, Uji Nutrisi dan Design Kemasan IKM	185	ikm	1,075,000,000	36	ikm	91,233,556									19.4594595	8.486842419	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.1.2	Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri	Jumlah Industri Kecil yang mendapatkan pengembangan tentang managemen teknologi industri IKM	190	ikm	825,000,000	25	ikm	97,966,400									13.1578947	11.87471515	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.1.3	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah Kelompok Industri Kecil yang mendapatkan pembinaan, diklat dan bantuan peralatan IKM	200	ikm	730,000,000	20	ikm	95,063,000									10	13.02232877	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri Kecil yang mendapatkan implementasi iptek										-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota											-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang memperoleh sertifikat HKI/merk, Halal, Uji Nutrisi dan design Kemasan							30	IKM	90,000,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.2	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase Perkembangan Pelaku Usaha Industri %	90 %		1,325,000,000	78 %		341,380,650									86.6666667	25.76457736	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.2.1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah Industri Kecil yang mendapat pembinaan, bantuan peralatan dan uji coba produk IKM	142	ikm	1,325,000,000	30	ikm	341,380,650									21.1267606	25.76457736	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.3	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Persentase Industri Kecil yang menerapkan teknologi Industri %	100 %		3,335,000,000	96 %		430,617,100									96	12.91205697	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.3.1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah Industri Kecil yajg mendapatkan pembinaan dan pelatihan IKM	460	ikm	1,350,000,000	15	ikm	141,690,150									3.26086957	10.49556667	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2022
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB MAGETAN

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
			Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek, Persentase Perkembangan pelakau usaha industri, Persentase industri kecil yang menerapkan teknologi industri, Jumlah sentra industri kecil yang berkembang	175	ikm	4,790,730				80	ikm	656,600,000	55	ikm	307,443,850	68.75	46.82	31	6,417	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen pengumpulan data industri	3	dokumen	155,000,000				1	dokumen	45,000,000	-	dokumen	29,611,450	-	65.80	-	19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.4	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah Sentra Industri Kecil yang berkembang sentra	10	sentra	240,000,000	0	sentra	0		sentra							0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.4.1	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah sentra industri potensial yang dilakukan pendataan Industri Kecil sentra	50	sentra	240,000,000	0	sentra	0		sentra							0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.5	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	persentase Kelompok alih profesi yang dibina dan berikan bantuan produksi %	100	%	6,115,000,000	54	%	757,994,050		%							54	12.39565086	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.5.1	Pembinaan dan Pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah kelompok yang dibina dan dilatih kelompok	40	kelompok	2,305,000,000	9	kelompok	481,552,050		kelompok							22.5	20.89162907	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.5.2	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat / Kelompok Masyarakat	Jumlah kelompok yang diberikan bantuan sarana produksi kelompok	37	kelompok	990,000,000	3	kelompok	144,002,000									8.10810811	14.54565657	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.5.3	Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri Masyarakat	Fasilitasi Pameran produk kerajinan dan hasil pelatihan kelompok	73	kelompok	820,000,000	28	kelompok	132,440,000									38.3561644	16.15121951	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.5.4	Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar	Jumlah Pasar yang dipelihara/rehab unit	4	unit	2,000,000,000	0	unit	0									0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase Industri kecil yang dibina dan berikan bantuan produksi (%)	90	%	1,200,000,000		%		90	%	295,000,000	-	%	-	-	-	0.00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelompok alih profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi	90	%	1,200,000,000		%		90	%	295,000,000	-	%	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase kelompok alih profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi	220	ikm	837,000,000				80	ikm	270,000,000	-	ikm	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2022
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB MAGETAN

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
			Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Persentase kelompok alih profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi	300	ikm	363,000,000				20	ikm	25,000,000	-	ikm	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.6	Program penataan struktur industri	Luas pembebasan lahan untuk pembangunan LIK II Ha	5	ha	5,000,000,000	0	ha	50,000,000									0	0.960975	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1.6.1	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Luas Lahan yang dibebaskan Ha	5	ha	5,000,000,000	1	dokume	50,000,000									20	0.960975	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat Skor	77.5	skor	3,845,280,000	77.478	skor	553,695,982									99.9716129	14.39936707	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase jumlah pelaksanaan penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran %	100	%	2,875,280,000	92	%	439,486,438									92	15.28499617	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase jumlah pelayanan Perjalanan dinas %	100	%	855,000,000	100	%	94,539,944									100	11.05730339	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.1.3	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat dokumen	5	dokume	115,000,000	1	dokume	19,669,600									20	17.104	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat 	75	skor	27,756,844,530		skor		75	skor	9,584,867,735	77.12	skor	3,647,080,284	102.83	38.05	102.826667	13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	99,300,000		skor		75	skor	33,000,000	7	skor	2,395,000	9.68	7.26	10	2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	21	laporan	71,300,000		laporan		7	laporan	23,000,000	-	laporan	880,000	-	3.83	-	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	18	dokumer	28,000,000		dokumen		6	dokumer	10,000,000	-	dokume n	1,515,000	-	15.15	-	5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	19,582,959,830				75	skor	5,871,573,235	31	skor	2,629,898,641	41.22	44.79	41	13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	6	laporan	14,000,000				2	laporan	5,000,000	-	laporan	780,000	-	15.60	-	6	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100	%	19,568,959,830				100	%	5,866,573,235	50	%	2,629,118,641	50.00	44.82	50	13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	2,746,491,500				75	skor	912,652,500	77	skor	104,214,600	102.83	11.42	103	4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya pelaporan pengelolaan retribusi daerah	100	%	62,000,000				100	%	20,000,000	-	%	1,415,000	-	7.08	-	2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya pelayanan pengelolaan retribusi daerah	100	%	2,684,491,500				100	%	892,652,500	25	%	102,799,600	25.00	11.52	25	4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
			Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.31.01.2.05	F		75	skor	93,500,000				75	skor	735,000,000	77	skor	-	102.83	-	103	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	105	pns	52,000,000				35	pns	20,000,000	-	pns	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	38	pns	41,500,000				18	pns	715,000,000	-	kali	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	1,288,163,000				75	skor	359,600,000	77	skor	101,678,512	102.83	28.28	103	8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	111,600,000				12	bulan	30,000,000	6	bulan	7,500,000	50.00	25.00	17	7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	88,000,000				12	bulan	25,000,000	6	bulan	5,252,000	50.00	21.01	17	6	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	60,760,000				12	bulan	19,600,000	6	bulan	6,480,600	50.00	33.06	17	11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	93,000,000				12	bulan	25,000,000	6	bulan	2,759,150	50.00	11.04	17	3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran -Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	48	unit	435,053,000				16	unit	125,000,000	-	unit	10,167,000	-	8.13	-	2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	42,500,000				12	bulan	15,000,000	6	bulan	3,935,850	50.00	26.24	17	9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dan pelayanan perjalanan dinas	36	bulan	457,250,000				12	bulan	120,000,000	2	bulan	65,583,912	12.50	54.65	4	14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	3,699,670,200				75	skor	1,533,442,000	49	skor	758,312,531	65.94	49.45	66	20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	792,050,000				12	bulan	215,500,000	6	bulan	72,442,531	50.00	33.62	17	9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	2,845,620,200				12	bulan	1,297,942,000	6	bulan	680,560,000	50.00	52.43	17	24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor yang dipelihara	105	unit	62,000,000				35	unit	20,000,000	10	unit	5,310,000	28.57	26.55	10	9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	246,760,000				75	skor	139,600,000	36	skor	50,581,000	48.31	36.23	48	20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6	unit	139,500,000				2	unit	45,000,000	1	unit	11,570,000	50.00	25.71	17	8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	57	unit	107,260,000				19	unit	34,600,000	8	unit	7,281,000	42.11	21.04	14	7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		unit					1	unit	40,000,000	1	unit	31,730,000	100.00	79.33	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		unit					1	unit	20,000,000	-	unit	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					74,590,204,260						17,991,054,735			5,496,316,120	42.82	30.55	1479.73	7.37	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018-2023 berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan perindustrian dan perdagangan.

Hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Perdagangan									
	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	-	Juta Rupiah	2,308,194.41	2,417,898.53	2,527,602.65	2,200,293.70	2,200,293.70	2,080,626.50	
	Persentase Pasar Kondisi Baik	-	%	60	70	75	46.2	60	76	
	Rasio ketersediaan los / bedak di pasar daerah	-	%	0.88	0.89	0.91	0.85	0.86	0.87	
	Pertumbuhan Usaha Perdagangan	-	%	7.1	7.11	7.15	7.13	12.28	2.57	
	Persentase PK5 yang menepati tempat usaha sesuai peruntukannya	-	%	7.1	7.9	8.3	5.8	10.6	9.9	
	Persentase Produk UKM yang masuk Pasar Modern	-	%	30	28	32	18	-	-	
2	Perindustrian									
	Pertumbuhan Industri Kecil Kabupaten Magetan	-	%	0.185	0.19	0.2	0.18	0.12	0.6	
	Nilai produksi industri kecil	-	Rupiah	733,188,081	734,581,140	736,050,300	730,507,686	731,834,686	731,834,686	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah lainnya

Tugas dan fungsi utama dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Isu strategis merupakan fenomena dan permasalahan yang belum tertangani dalam melaksanakan tugas fungsinya adalah

1. Era [revolusi industri](#) ke-4 (Industry 4.0) akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya, industri akan semakin kompak dan efisien. Namun ada pula risiko yang mungkin muncul, misalnya berkurangnya Sumber Daya Manusia karena digantikan oleh mesin atau robot semua serba *Internet of/for Things*, dan masih sangat kecilnya pengetahuan dan kesiapan industri kita berinovasi menyesuaikan dengan era industri 4.0
2. Perlunya peningkatan SDM (pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan termasuk penguasaan iptek) bagi pengusaha IKM, UKM dan IRT sebagai sarana diversifikasi usaha ekonomi/dalam mengelola usahanya.
3. Masih perlunya Pengembangan Industri kecil sebagai penunjang Pariwisata baik dari kemasan maupun dari factor perijinan produk, yang dapat dikembangkan untuk oleh – oleh khas.
4. Masih rendahnya kemampuan penerapan teknologi industri terutama industri kecil di kabupaten magetan mengakibatkan kurang bersaing dengan produk yang sama dari daerah lain
5. Pembangunan sentra – sentra ekonomi/penumbuhan usaha baru agar memberi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mengembangkan usahanya.
6. Membuat data yang valid untuk penerima bantuan baik bantuan berupa peralatan supaya tepat sasaran dan tidak terjadi pemasalahan ketika akan memberi bantuan
7. Data base IKM (jumlah, jenis komoditi, potensi kuantitatif, sebaran, dan lainlain)
8. Masih perlunya Penataan, pengawasan, pengelolaan dan pengembangan kawasan Industri kecil dan menengah utamanya industri unggulan yang dimiliki Kab. Magetan yaitu Industri kecil pengolahan kulit menjadi industri unggulan dan memiliki keterkaitan proses hulu hilir industri, dimana Industri kecil penyamakan kulit sebagai industri hulunya dan industri kecil kerajinan kulit sebagai industri hilirnya.

9. Ipal mengolahan Limbah Industri Penyamakan Kulit belum memadai sehingga sangat mencemari dan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup (Ancaman pencemaran lingkungan dari industri kulit)
10. Pemilihan lokasi realokasi LIK 2 yang masih terkendala pemilihan lokasi dan pembebasan lahan.
11. Fasilitasi kepada IKM dan UKM tentang adanya pameran - pameran, hal ini sangat penting sekali untuk meningkatkan omset penjualan bagi IKM, baik pameran yang diadakan di Kab. Magetan maupun diluar Kab. Magetan
12. Data base Pedagang Kaki Lima (jumlah, jenis komoditi, potensi kuantitatif, sebaran, dan lain lain)
13. Penataan pedagang PK5 di tempat sesuai peruntukannya.
14. Masih diperlukannya tata kelola pasar tradisional agar dapat bersaing dengan pasar modern untuk menarik minat konsumen datang belanja di pasar tradisional.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan tahun 2009-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2019 – 2023, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, perkembangan kondisi bidang politik, ekonomi, social, budaya dan keamanan masyarakat yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergisitas antar sektor dan antar wilayah serta penjangkaran aspirasi masyarakat.

Dokumen RKPD Kab. Magetan tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magetan, menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berikut: Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan

TABEL T-C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. MAGETAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	JUMLAH				15,979,378,701	JUMLAH				15,979,378,701	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				6,562,750,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				6,562,750,000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau		75 %	125,500,000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau		75 %	125,500,000	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau		75 %	13,500,000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau		75 %	13,500,000	

1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Magetan	1 Dokumen	13,500,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Magetan	1 Dokumen	13,500,000	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah mengajukan izin TDG		75%	10,000,000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah mengajukan izin TDG		75%	10,000,000	
2	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kab. Magetan	1 Dokumen	10,000,000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kab. Magetan	1 Dokumen	10,000,000	
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase pemenuhan komitmen perolehan STPW		75%	13,500,000	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase pemenuhan komitmen perolehan STPW		75%	13,500,000	

3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kab. Magetan	1 Dokumen	13,500,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kab. Magetan	1 Dokumen	13,500,000	
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau		75%	88,500,000	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau		75%	88,500,000	
4	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Magetan	8 Laporan	38,500,000	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Magetan	8 Laporan	38,500,000	

5	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Magetan	8 Laporan	50,000,000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Magetan	8 Laporan	50,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi		85 %	5,577,000,000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi		85 %	5,577,000,000
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi		85 %	5,102,000,000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi		85 %	5,102,000,000
6	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Magetan	6 Unit	4,362,000,000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Magetan	6 Unit	4,362,000,000
7	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Magetan	21 Unit	740,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Magetan	21 Unit	740,000,000
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan sarana distribusi		85 %	475,000,000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan sarana distribusi		85 %	475,000,000

8	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Magetan	1 Dokumen	475,000,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Magetan	1 Dokumen	475,000,000	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau		100 %	301,750,000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau		100 %	301,750,000	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau		100 %	249,500,000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau		100 %	249,500,000	
9	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	3 Laporan	80,000,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	3 Laporan	80,000,000	

10	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Magetan	52 Laporan	49,500,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Magetan	52 Laporan	49,500,000	
11	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	4 Laporan	120,000,000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	4 Laporan	120,000,000	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau		100 %	52,250,000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau		100 %	52,250,000	
12	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Magetan	3 Laporan	52,250,000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Magetan	3 Laporan	52,250,000	

	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pelaksanaan Pameran		90 %	120,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pelaksanaan Pameran		90 %	120,000,000	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pameran		90 %	120,000,000	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pameran		90 %	120,000,000	
13	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab. Magetan	12 Pelaku Usaha	75,000,000	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab. Magetan	12 Pelaku Usaha	75,000,000	
14	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kab. Magetan	6 Pelaku Usaha	45,000,000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kab. Magetan	6 Pelaku Usaha	45,000,000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang ditera		100 %	200,000,000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang ditera		100 %	200,000,000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera		100 %	200,000,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera		100 %	200,000,000	

15	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Magetan	20000 Unit	125,000,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Magetan	20000 Unit	125,000,000	
16	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Magetan	500 Orang	75,000,000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Magetan	500 Orang	75,000,000	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaku usaha perdagangan		80 %	238,500,000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaku usaha perdagangan		80 %	238,500,000	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha perdagangan		80 %	238,500,000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha perdagangan		80 %	238,500,000	
17	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	12 UMKM	200,000,000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	12 UMKM	200,000,000	

18	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kab. Magetan	20 UMKM	38,500,000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kab. Magetan	20 UMKM	38,500,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					9,416,628,701	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					9,416,628,701
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	7,513,628,701	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	7,513,628,701	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	31,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	31,000,000	
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	7 Dokumen	11,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	7 Dokumen	11,000,000	
20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	7 Laporan	20,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	7 Laporan	20,000,000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	3,854,604,701	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	3,854,604,701	
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan	62 Orang/bulan	3,849,104,701	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan	62 Orang/bulan	3,849,104,701	
22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Magetan	2 Laporan	5,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Magetan	2 Laporan	5,500,000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	499,374,000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	499,374,000	
23	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Magetan	2 Dokumen	477,374,000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan	Kab. Magetan	2 Dokumen	477,374,000	

							Retribusi Daerah				
24	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Magetan	24 Dokumen	22,000,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Magetan	24 Dokumen	22,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	39,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	39,000,000	
25	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Magetan	18 Orang	17,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Magetan	18 Orang	17,000,000	
26	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Magetan	2 Orang	22,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Magetan	2 Orang	22,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	453,200,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	453,200,000	

27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	3 Paket	29,700,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	3 Paket	29,700,000	
28	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	6 Paket	172,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	6 Paket	172,000,000	
29	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Magetan	3 Paket	17,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Magetan	3 Paket	17,000,000	
30	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Paket	27,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Paket	27,500,000	
31	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Paket	21,600,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Paket	21,600,000	
32	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Magetan	40 Dokumen	35,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Magetan	40 Dokumen	35,400,000	

33	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan	24 Laporan	150,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan	24 Laporan	150,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	2,493,450,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	2,493,450,000	
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Laporan	240,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Laporan	240,000,000	
35	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Laporan	22,020,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Laporan	22,020,000	
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Laporan	2,231,430,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Laporan	2,231,430,000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	143,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	143,000,000	
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Magetan	1 Unit	50,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Magetan	1 Unit	50,000,000	
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Magetan	5 Unit	33,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Magetan	5 Unit	33,000,000	
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Magetan	1 Unit	40,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Magetan	1 Unit	40,000,000	

40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Magetan	1 Unit	20,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Magetan	1 Unit	20,000,000	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perkembangan pelaku usaha industri		90 %	1,575,000,000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perkembangan pelaku usaha industri		90 %	1,575,000,000	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase perkembangan pelaku usaha industri		90 %	1,575,000,000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase perkembangan pelaku usaha industri		90 %	1,575,000,000	
41	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Magetan	4 Dokumen	265,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Magetan	4 Dokumen	265,000,000	

42	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Magetan	1 Dokumen	615,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Magetan	1 Dokumen	615,000,000	
43	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Magetan	13 Dokumen	645,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Magetan	13 Dokumen	645,000,000	
44	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Magetan	1 Dokumen	50,000,000	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Magetan	1 Dokumen	50,000,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek		90 %	50,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek		90 %	50,000,000	

	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek		90 %	50,000,000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek		90 %	50,000,000	
45	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	1 Dokumen	50,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	1 Dokumen	50,000,000	

	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri kecil yang dibina dan diberikan bantuan produksi (%)		90 %	278,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri kecil yang dibina dan diberikan bantuan produksi (%)		90 %	278,000,000	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase industri kecil yang dibina dan diberikan bantuan produksi (%)		90 %	278,000,000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase industri kecil yang dibina dan diberikan bantuan produksi (%)		90 %	278,000,000	
46	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Magetan	2 Dokumen	250,000,000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Magetan	2 Dokumen	250,000,000	

47	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Magetan	1 Dokumen	28,000,000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Magetan	1 Dokumen	28,000,000
----	---	--	--------------	-----------	------------	---	--	--------------	-----------	------------

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam tahun 2023 ini program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan.

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Bantuan Peralatan Laseri	Rt 006 Rw.02 Dsn Ngasem Desa Banjarejo Kec. Panekan	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
2	Bantuan Peralatan Laseri	Jl. Wiratama 2 Blok O KPR Asabri 1 Rt 08 Rw 05 Kel. Tawanganom Kec. Magetan	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
3	Bantuan Peralatan Laseri	Ds. Duwet Kec. Bendo Kab Magetan	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
4	Bantuan Pengadaan Molen Cor	Dk. Mbulak Ombo RT.15 RW. 03 Ds.Pojoksari Kec. Sukomoro	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
5	Bantuan Peralatan Pertukangan Kayu	Dsn Wonomulyo Rt. 20 Rw.03 Ds. Genilangit Kec. Poncol	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
6	Bantuan Peralatan Jahit	Dsn. Sampung Rt.15 Rw.03 Ds Sidorejo Kec. Sidorejo	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir

7	Bantuan Peralatan Jahit	Rt. 38 Rw. 14 Ds. Belotan Kec. Bendo	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
8	Bantuan Peralatan Jahit	Rt. 28 Rw. 11 Ds. Belotan Kec. Bendo	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
9	Bantuan Peralatan Jahit	Jl. Gotong Royong Rt. 05 Rw. 02 Ds. Sempol Kec. Maospati	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
10	Bantuan Gerobak Pedagang Kaki Lima	Kelurahan Kawedanan Kec. Kawedanan	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
11	Bantuan Peralatan Makanan Olahan	Ds. Kebonagung Kec. Magetan	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
12	Bantuan Peralatan Jahit	Dsn Legok Rt. 12 Rw. 03 Ds. Durenan Kec. Sidorejo	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
13	Bantuan Peralatan Makanan Olahan	Dsn. Turus Rt. 05 Rw.01 Kel Alastuwo Kec. Poncol	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
14	Bantuan Peralatan Produksi Kerajinan Kulit	Jl. Diponegoro Rt. 01 Rw 03 Kec. Magetan	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir

15	Bantuan Peralatan dan sarana berjualan kakilima	Jl. Yos Sudarso gg. Blimbing Kel Kebonagung Kec. Magetan	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
16	Bantuan Peralatan Jahit	Jl. Kelud Rt. 06 Rw. 01 Kec. Magetan	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
17	Pengadaan Peralatan Produksi	DS. Karangsono Kec. Barat	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
18	Pengadaan Peralatan Produksi	Ds. Tapak, Panekan	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
19	Pengadaan Peralatan Produksi	Ds. Milangasri, Panekan	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
20	Pengadaan Peralatan Produksi	Kelurahan Tebon Kec. Barat	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
21	Pengadaan Peralatan Jahit	Ds. Sumberagung Kec. Plaosan	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
22	Pengadaan Peralatan Jahit	Desa Bulu 05/03 Kec.Sukomoro	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir

23	Pengadaan Peralatan Batik	Desa Pojoksari Kec.Sukomoro	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
24	Pengadaan Peralatan Jahit	Ds. Ringinagung 02/03 Kec.Magetan	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
25	Pengadaan Peralatan Sablon	Dsn. Papringan Ds. Sidomukti 21/04 Kec.Plaosan	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
26	Pengadaan Peralatan Jahit	Desa Dsn. Papringan Ds. Sidomukti 23/04 Kec.Plaosan	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
27	Pengadaan Peralatan Konveksi	Perum Bukit Selosari Permai, Jl. Ki Hajar Dewantara VI Blok C 9 No 2 Kec.Magetan	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
28	Pengadaan Peralatan Jahit	Desa Soco 04/01 Kec.Bendo	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
29	Peralatan Las	Desa Balegondo Kec.Ngariboyo	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
30	Peralatan Las	Ds Pacalan Kec.Plaosan	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir

31	Peralatan Las	Ds. Kartoharjo Kec. Kartoharjo	Meningkatkan sarana penunjang produksi guna terwujudnya kemandirian kelompok usaha	1 Paket	Akomodir
----	---------------	-----------------------------------	--	---------	----------

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.3.1 SEKTOR INDUSTRI

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan SDM;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan tersebut merupakan amanat Presiden untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Selanjutnya, dari kelima arahan tersebut dirumuskan agenda pembangunan yang didalamnya mencakup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Adapun agenda pembangunan tersebut yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

A. Arah dan Kebijakan Industri Nasional

Fokus Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Kementerian Perindustrian berkontribusi dalam Agenda Pembangunan I yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”. Kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi akan dilakukan dengan melaksanakan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kementerian Perindustrian juga turut berperan dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 3 yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Kebijakan pembangunan manusia yang terkait dengan sektor industri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Adapun arah kebijakan dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan pada tahun 2020-2024 yang menjadi tugas Kementerian Perindustrian mencakup:

Agenda 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Arah Kebijakan yaitu

1. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:

- 1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;
- 2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
- 3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata;
- 4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
- 5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
- 6) mengembangkan industri halal.

2. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:

- 1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan;
- 2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
- 3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga;
- 4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata;
- 5) reformasi fiskal; dan
- 6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Agenda 2 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Arah Kebijakan: Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui:

1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industry.
2. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas.

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. pengelolaan sumber daya ekonomi; dan
2. peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan nonmigas. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional.

Penjabarannya dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian. Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada pembangunan 10 industri prioritas sebagai berikut:

1. industri pangan (makanan dan minuman);
2. industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
3. industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
4. industri alat transportasi;
5. industri elektronika dan telematika/ICT;
6. industri pembangkit energi;

7. industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
8. industri hulu agro;
9. industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
10. industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Berdasarkan 10 industri prioritas tersebut diatas, pada implementasi Making Indonesia 4.0 lebih di fokuskan pada 5 sektor industri, yaitu: 1. industri makanan dan minuman; 2. industri tekstil dan busana; 3. industri otomotif; 4. industri kimia; dan 5. industri elektronika.

Pada bidang pengembangan iklim industry telah dilaksanakan berbagai langkah untuk mendukung peningkatan usaha, investasi dan produksi. Beberapa langkah penting antara lain:

1. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Industri dalam rangka lebih menertibkan dan pengelolaan lingkungan yang baik.
2. Penyusunan kebijakan percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan UMKM Kementerian Perindustrian tentang peningkatan efektivitas pengembangan IKM melalui pendekatan satu desa satu produk (one village one product – OVOP). Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian No. 78/M.IND/PER/2007

Pada Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M.IND/PER/4/2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang telah disosialisasikan dan diterapkan di Instansi.

B. Isu – Isu Strategis Nasional

1. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
2. Perluasan Pasar Domestik
3. Perbaikan Infrastruktur
4. Peningkatan Kemampuan Teknologi
5. Penyebaran Industri di Luar Pulau Jawa (40 berbanding 60)
6. Pemerataan Kemampuan Industri
7. Nilai Tambah Produk Industri
8. Penerapan Industri Berwawasan Lingkungan
9. Pemanfaatan Energi Terbarukan
10. Penciptaan Lapangan Kerja

3.3.2 SEKTOR PERDAGANGAN

Dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, RPJMN 2020-2024 sebagai landasan utama pembangunan Indonesia selama lima tahun kedepan telah menuangkan 5 (lima) Arah Presiden yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Dalam mendukung dan mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi dalam Agenda Pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian Perdagangan memiliki 12 arah kebijakan. Arah kebijakan yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ada 3, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
2. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
3. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri

Arah pelaksanaan kegiatan dalam kerangka pengembangan perdagangan dalam negeri terdiri dari lima bagian yaitu sebagai berikut.

- a. Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting melalui penyempurnaan berbagai kebijakan terkait distribusi komoditi di dalam negeri, peningkatan efektivitas monitoring stok dan harga bahan pokok, ketersediaan data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akurat, serta stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang HBKN.
- b. Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan melalui studi pengembangan sistem logistik nasional, fasilitasi peningkatan daya saing sarana distribusi perdagangan dan pengembangan sistem informasi sarana logistik perdagangan, penyusunan dan pengembangan kebijakan dan peningkatan pembinaan serta fasilitasi revitalisasi pasar rakyat dalam rangka meningkatkan daya saing pasar rakyat, dan fasilitasi pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan khususnya daerahdaerah perbatasan dan daerah tertinggal/terpencil dalam rangka percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan.
- c. Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi Perdagangan melalui berbagai penyempurnaan dan penyusunan kebijakan di bidang usaha perdagangan, rancangan kebijakan di bidang usaha perdagangan secara elektronik, rancangan kebijakan di bidang usaha perdagangan konvensional, dan pembinaan pelaku usaha di bidang perdagangan.
- d. Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui peningkatan kewirausahaan dan bantuan pemasaran, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan promosi makanan dan minuman sehat nusantara sehingga dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan dukungan pemasaran produk dalam negeri.

e. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah dengan fokus kegiatan pada peningkatan kualitas logistik daerah, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan iklim usaha dan pengembangan pasar domestik daerah melalui kegiatan monitoring harga dan stok barang kebutuhan pokok, pemetaan sarana distribusi perdagangan dan pelaku jasa logistik di daerah, sosialisasi dan harmonisasi kebijakan pembinaan usaha, pembinaan usaha kecil dan menengah, fasilitasi pasar murah, perlindungan konsumen di daerah, Standardisasi dan Pengendalian Mutu di Daerah, dan penggunaan pasar lelang di daerah.

Outcome yang diharapkan dari pengembangan perdagangan dalam negeri adalah:

- (i). Mewujudkan stabilitas harga barang kebutuhan pokok;
- (ii). Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- (iii). Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dan Sarana Perdagangan.

Adanya arahan arahan terkait peningkatan kinerja perdagangan dalam negeri dari dokumen RPJM Nasional 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024, menjadi landasan dalam menyusun arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk 5 tahun ke depan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan :

1. Meningkatkan kegiatan sektor perdagangan
2. Meningkatkan Pertumbuhan Industri

Sasaran :

1. Meningkatnya daya saing sektor perdagangan
2. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil

Target sasaran Renja Disperindag tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kegiatan sektor perdagangan			1.1	Nilai PDRB sektor perdagangan	2,527,602.65 Juta Rupiah
		1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1.1.1	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	7,15%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri			2.1	Nilai PDRB sektor Industri	919,090.12 Juta Rupiah
		2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	2.1.1	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	0,200 %

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan memperhatikan pada :

- a. Hasil review terhadap pelaksanaan Renja tahun 2021 dan 2022;
- b. Hasil analisis kinerja pelayanan SKPD tahun 2021;
- c. Hasil penelaahan terhadap usulan program/kegiatan masyarakat;
- d. Hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi; serta
- e. isu-isu/permasalahan penting yang dihadapi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, yang disandingkan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam Renstra Disperindag tahun 2019-2023, maka Program/kegiatan yang dilaksanakan Disperindag Tahun 2023 adalah sebagaimana berikut ini :

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3	30	002			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3	30	002	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
3	30	002	2.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3	30	002	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3	30	002	2.02	001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3	30	002	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
3	30	002	2.03	002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
3	30	002	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3	30	002	2.06	001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
3	30	002	2.06	003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
3	30	003			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3	30	003	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	003	2.01	001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	003	2.01	002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	003	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
3	30	003	2.02	001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	004			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
3	30	004	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3	30	004	2.02	001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

3	30	004	2.02	002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
3	30	004	2.02	003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
3	30	004	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	30	004	2.03	003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
3	30	005			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3	30	005	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	30	005	2.01	003	Pameran Dagang Lokal
3	30	005	2.01	004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
3	30	006			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3	30	006	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
3	30	006	2.01	001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
3	30	006	2.01	002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
3	30	007			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
3	30	007	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
3	30	007	2.01	001	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
3	30	007	2.01	002	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3	31	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3	31	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	31	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3	31	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	31	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	31	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3	31	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3	31	001	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
3	31	001	2.04	001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
3	31	001	2.04	007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
3	31	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3	31	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3	31	001	2.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
3	31	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	31	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3	31	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	31	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3	31	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3	31	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
3	31	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3	31	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3	31	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	31	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	31	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	31	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3	31	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	31	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3	31	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	31	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3	31	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3	31	002			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3	31	002	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3	31	002	2.01	003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
3	31	002	2.01	004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3	31	002	2.01	005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
3	31	002	2.01	006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
3	31	003			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
3	31	003	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
3	31	003	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
3	31	004			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3	31	004	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
3	31	004	2.01	001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
3	31	004	2.01	002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. MAGETAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif				
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG							6,562,750,000			
3	30	002	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	75 %	125,500,000				75 %	125,500,000		
3	30	002	2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	75 %	13,500,000				13,500,000		
3	30	002	2.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	13,500,000			1 Dokumen	13,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	002	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah mengajukan izin TDG		10,000,000				10,000,000	
3	30	002	2.02	001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	10,000,000			1 Dokumen	10,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
3	30	002	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase pemenuhan komitmen perolehan STPW		13,500,000				13,500,000	
3	30	002	2.03	002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1 Dokumen	13,500,000			1 Dokumen	13,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	002	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau		88,500,000				88,500,000	
3	30	002	2.06	001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	8 Laporan	38,500,000			8 Laporan	38,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. MAGETAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	30 002 2.06 003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	8 Laporan	50,000,000			8 Laporan	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30 003	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi	85 %	5,577,000,000			85 %	5,577,000,000	
3	30 003 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi	85 %	5,102,000,000				5,102,000,000	
3	30 003 2.01 001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	4,362,000,000			6 Unit	4,362,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30 003 2.01 002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21 Unit	740,000,000			21 Unit	740,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30 003 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan sarana distribusi	85 %	475,000,000				475,000,000	
3	30 003 2.02 001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	475,000,000			1 Dokumen	475,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30 004	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	100 %	301,750,000			100 %	301,750,000	
3	30 004 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	100 %	249,500,000				249,500,000	
3	30 004 2.02 001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	80,000,000			3 Laporan	80,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30 004 2.02 002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	52 Laporan	49,500,000			52 Laporan	49,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. MAGETAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	30 004 2.02 003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	120,000,000			4 Laporan	120,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30 004 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	100 %	52,250,000				52,250,000	
3	30 004 2.03 003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Laporan	52,250,000			3 Laporan	52,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30 005	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pelaksanaan Pameran	90 %	120,000,000			90 %	120,000,000	
3	30 005 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pameran	90 %	120,000,000			90 %	120,000,000	
3	30 005 2.01 003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	12 Pelaku Usaha	75,000,000			12 Pelaku Usaha	75,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30 005 2.01 004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6 Pelaku Usaha	45,000,000			6 Pelaku Usaha	45,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30 006	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTPP yang ditera	100 %	200,000,000			100 %	200,000,000	
3	30 006 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTPP yang ditera	100 %	200,000,000				200,000,000	
3	30 006 2.01 001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	20000 Unit	125,000,000			20000 Unit	125,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30 006 2.01 002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	500 Orang	75,000,000			500 Orang	75,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30 007	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaku usaha perdagangan	80 %	238,500,000			80 %	238,500,000	

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. MAGETAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif					
3	30	007	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha perdagangan	80 %	238,500,000				80 %	238,500,000	
3	30	007	2.01	001	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	12 UMKM	200,000,000				12 UMKM	200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	007	2.01	002	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20 UMKM	38,500,000				20 UMKM	38,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			9,416,628,701					9,416,628,701	
3	31	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	7,513,628,701				75 skor	7,513,628,701	
3	31	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		31,000,000					31,000,000	
3	31	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	11,000,000				7 Dokumen	11,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	20,000,000				7 Laporan	20,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		3,854,604,701					3,854,604,701	
3	31	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	3,849,104,701				62 Orang/bulan	3,849,104,701	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5,500,000				2 Laporan	5,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	001	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		499,374,000					499,374,000	
3	31	001	2.04	001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	477,374,000				2 Dokumen	477,374,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	001	2.04	007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	24 Dokumen	22,000,000				24 Dokumen	22,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. MAGETAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif											
3	31	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		39,000,000												
3	31	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	17,000,000				18 Orang	17,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
3	31	001	2.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	22,000,000				35 Orang	22,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
3	31	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		453,200,000					453,200,000							
3	31	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	29,700,000				3 Paket	29,700,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
3	31	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	172,000,000				6 Paket	172,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
3	31	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	17,000,000				3 Paket	17,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
3	31	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	27,500,000				12 Paket	27,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
3	31	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21,600,000				12 Paket	21,600,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
3	31	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40 Dokumen	35,400,000				40 Dokumen	35,400,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
3	31	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	150,000,000				24 Laporan	150,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
3	31	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		2,493,450,000					2,493,450,000							
3	31	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	240,000,000				12 Laporan	240,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
3	31	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22,020,000				12 Laporan	22,020,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
3	31	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,231,430,000				12 Laporan	2,231,430,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. MAGETAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	31 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		143,000,000				143,000,000	
3	31 001 2.09 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50,000,000			1 Unit	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31 001 2.09 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	33,000,000			6 Unit	33,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31 001 2.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40,000,000			1 Unit	40,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31 001 2.09 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20,000,000			1 Unit	20,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31 002	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perkembangan pelaku usaha industri	90 %	1,575,000,000			90 %	1,575,000,000	
3	31 002 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase perkembangan pelaku usaha industri	90 %	1,575,000,000				1,575,000,000	
3	31 002 2.01 003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	265,000,000			4 Dokumen	265,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31 002 2.01 004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	615,000,000			1 Dokumen	615,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31 002 2.01 005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	13 Dokumen	645,000,000			13 Dokumen	645,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31 002 2.01 006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	50,000,000			1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31 003	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek	90 %	50,000,000			90 %	50,000,000	

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. MAGETAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
3	31 003 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek	90 %	50,000,000				50,000,000	
3	31 003 2.01 002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000			1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31 004	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri kecil yang dibina dan diberikan bantuan produksi (%)	90 %	278,000,000			90 %	278,000,000	
3	31 004 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase industri kecil yang dibina dan diberikan bantuan produksi (%)	90 %	278,000,000				278,000,000	
3	31 004 2.01 001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	250,000,000			2 Dokumen	250,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31 004 2.01 002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	28,000,000			1 Dokumen	28,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TOTAL						15,979,378,701			15,979,378,701	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan Tahun 2023 yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magetan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.02.2000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.02.2000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keterangan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Luas Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Page Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cairan Pening	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Keterangan Dana/ Page Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tabel Uraian	Target
3														
3									6.542.750.000					0
3									125.500.000					0
3	02	2.01							13.500.000					0
3	02	2.01							13.500.000					0
3	02	2.01	01	01	01	01	01	01	13.500.000					0
3	02	2.01	01	01	01	01	01	01	13.500.000					0
3	02	2.02							10.000.000					0
3	02	2.02							10.000.000					0
3	02	2.02	01	01	01	01	01	01	10.000.000					0
3	02	2.02	01	01	01	01	01	01	10.000.000					0
3	02	2.03							13.500.000					0
3	02	2.03							13.500.000					0
3	02	2.03	02	02	02	02	02	02	13.500.000					0
3	02	2.03	02	02	02	02	02	02	13.500.000					0
3	02	2.06							88.500.000					0
3	02	2.06							88.500.000					0
3	02	2.06	01	01	01	01	01	01	38.500.000					0
3	02	2.06	01	01	01	01	01	01	38.500.000					0
3	02	2.06	02	02	02	02	02	02	50.000.000					0
3	02	2.06	02	02	02	02	02	02	50.000.000					0
3	02	2.08							5.377.000.000					0
3	02	2.08							5.377.000.000					0
3	02	2.08	01	01	01	01	01	01	4.362.000.000					0
3	02	2.08	01	01	01	01	01	01	4.362.000.000					0
3	02	2.08	02	02	02	02	02	02	740.000.000					0
3	02	2.08	02	02	02	02	02	02	740.000.000					0
3	02	2.08	03	03	03	03	03	03	475.000.000					0
3	02	2.08	03	03	03	03	03	03	475.000.000					0
3	02	2.08	04	04	04	04	04	04	475.000.000					0
3	02	2.08	04	04	04	04	04	04	475.000.000					0
3	02	2.08	05	05	05	05	05	05	291.750.000					0
3	02	2.08	05	05	05	05	05	05	291.750.000					0
3	02	2.08	06	06	06	06	06	06	345.500.000					0
3	02	2.08	06	06	06	06	06	06	345.500.000					0
3	02	2.08	07	07	07	07	07	07	80.000.000					0
3	02	2.08	07	07	07	07	07	07	80.000.000					0
3	02	2.08	08	08	08	08	08	08	45.500.000					0
3	02	2.08	08	08	08	08	08	08	45.500.000					0
3	02	2.08	09	09	09	09	09	09	170.000.000					0
3	02	2.08	09	09	09	09	09	09	170.000.000					0
3	02	2.08	10	10	10	10	10	10	52.250.000					0
3	02	2.08	10	10	10	10	10	10	52.250.000					0
3	02	2.08	11	11	11	11	11	11	124.000.000					0
3	02	2.08	11	11	11	11	11	11	124.000.000					0
3	02	2.08	12	12	12	12	12	12	75.000.000					0
3	02	2.08	12	12	12	12	12	12	75.000.000					0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Mayang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.31.3.30.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 8.31.3.30.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Profilman Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Subsumber Sub Kegiatan	Masi Kegiatan	Lakut Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Tingkat Urair				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Masi Kegiatan							
1 30 06 2.01 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaksanaan Pameran	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaksanaan Pameran		90 %	6 Pelaku Usaha	90 %	45,000,000			Jumlah Pelaksanaan Pameran	90 %	0	
8 30 06	PROGRAM STANDARISASI DAN PELINDUNGAN KONSUMEN								290,000,000					0	
8 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berapa Tara, Tara Ulang, dan Pengemasan								290,000,000					0	
1 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berapa Tara, Tara Ulang	Persentase UTPP yang ditera	Jumlah Alat Ukur: Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlangkapan Ditera Ulang	Jumlah UTPP yang ditera		100 %	20000 Unit	100 %	125,000,000			Persentase UTPP yang ditera	100 %	0	
1 30 06 2.01 02	Pengemasan/Perubahan Metrologi Legal	Persentase UTPP yang ditera	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Ditera	Jumlah UTPP yang ditera		100 %	500 Orang	100 %	75,000,000			Persentase UTPP yang ditera	100 %	0	
8 30 07	PROGRAM PENGUJIAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGARA								238,500,000					0	
8 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negari								238,500,000					0	
1 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negari di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perdagangan	Jumlah URAKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negari di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perdagangan		80 %	12 URAKMA	80 %	200,000,000			Jumlah pelaku usaha perdagangan	80 %	0	
1 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negari di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perdagangan	Jumlah URAKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negari Melalui Kampanye dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Anemodasi	Jumlah pelaku usaha perdagangan		80 %	20 URAKMA	80 %	38,500,000			Jumlah pelaku usaha perdagangan	80 %	0	
8 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								8,616,628,791					0	
8 31 01	PROGRAM PENGUJIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7,316,628,791					0	
8 31 01 2.01	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								31,000,000					0	
1 31 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	7 Dokumen	75 skor	11,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
1 31 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	7 Laporan	75 skor	20,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
8 31 01 2.02	Administratif Keunggulan Perangkat Daerah								8,654,004,791					0	
1 31 01 2.02 01	Penyediaan Gap dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Orang yang Memerika Gap dan Tunjangan ASN	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	62 Orang/bulan	75 %	3,843,104,791			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
1 31 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SEPDI	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SEPDI	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	2 Laporan	75 %	5,500,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
8 31 01 2.04	Administratif Pengelolaan Daerah Keunggulan Perangkat Daerah								499,374,000					0	
1 31 01 2.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	2 Dokumen	75 skor	477,374,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
1 31 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	24 Dokumen	75 skor	22,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
8 31 01 2.05	Administratif Kepagastan Perangkat Daerah								38,000,000					0	
1 31 01 2.05 10	Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	18 Orang	75 %	17,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
1 31 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	35 Orang	75 %	22,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
8 31 01 2.06	Administratif Usahan Perangkat Daerah								452,708,000					0	
1 31 01 2.06 01	Penyediaan Kumpulan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Kumpulan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	3 Paket	75 skor	29,700,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
1 31 01 2.06 02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	6 Paket	75 skor	172,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
1 31 01 2.06 03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		75 skor	3 Paket	75 skor	17,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magetan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.3.30.01.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.01.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Profilisasi Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian Kinerja						Tahap Urair	Target
							Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
3 31 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	75 skor	12 Paket	75 skor	27.500.000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
3 31 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengungkapan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengungkapan yang Disediakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	75 skor	12 Paket	75 skor	21.600.000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
3 31 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	75 skor	40 Dokumen	75 skor	35.400.000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
3 31 01 2.06 09	Pengembangan Riset Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	75 skor	24 Laporan	75 skor	150.000.000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
3 31 01 2.06	Penyediaan Jasa Pemangung Urusan Pemerintahan Daerah							2.493.454.800					0	
3 31 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	75 skor	12 Laporan	75 skor	240.000.000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
3 31 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Pertinggalan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Pertinggalan Kantor yang Disediakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	75 skor	12 Laporan	75 skor	22.020.000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
3 31 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	75 skor	12 Laporan	75 skor	3.211.430.000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
3 31 01 2.09	Pemeliharaan Sarung Milik Daerah Pemangung Urusan Pemerintahan Daerah							143.000.000					0	
3 31 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	75 skor	1 Unit	75 skor	50.000.000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
3 31 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pemeliharaannya	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	75 skor	6 Unit	75 skor	33.000.000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
3 31 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	75 skor	1 Unit	75 skor	40.000.000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
3 31 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	75 skor	1 Unit	75 skor	20.000.000			Indeks Kepuasan Masyarakat	75 skor	0	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							1.575.000.000					0	
3 31 02 2.01	Pengembangan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							1.575.000.000					0	
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase perkembangan pelaku usaha industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi tepat, persentase perkembangan pelaku usaha industri, persentase industri kecil yang memperoleh kredit yang berkembang	90 %	4 Dokumen	90 %	245.000.000			Persentase perkembangan pelaku usaha industri	90 %	0	
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase perkembangan pelaku usaha industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi tepat, persentase perkembangan pelaku usaha industri, persentase industri kecil yang memperoleh kredit yang berkembang	90 %	1 Dokumen	90 %	615.000.000			Persentase perkembangan pelaku usaha industri	90 %	0	
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase perkembangan pelaku usaha industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi tepat, persentase perkembangan pelaku usaha industri, persentase industri kecil yang memperoleh kredit yang berkembang	90 %	13 Dokumen	90 %	645.000.000			Persentase perkembangan pelaku usaha industri	90 %	0	
3 31 02 2.01 06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persentase perkembangan pelaku usaha industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi tepat, persentase perkembangan pelaku usaha industri, persentase industri kecil yang memperoleh kredit yang berkembang	90 %	1 Dokumen	90 %	50.000.000			Persentase perkembangan pelaku usaha industri	90 %	0	
3 31 02	PROGRAM PEMBINAAN DAN USAHA INDUSTRI							50.000.000					0	
3 31 02 2.01	Pembinaan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							50.000.000					0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Magetan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.31.1.20.02.02.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 8.31.1.20.02.02.000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Ortografi Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Ciri-ciri Penting	Target Capaian Kinerja		Kebijakan Dana/ Paga Indikatif (Rp.)				
						Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tidak Ulang	Target					
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinergisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup U/L, P/L, B/LI dan P/LI Kawasan Kabupaten/ Kota	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi sp3t	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinergisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Kawasan Kawasan Industri Kawasan Kabupaten/Kota	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi sp3t		90 %	1 Dokumen	90 %	50.000,000			Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi sp3t	90 %	0
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									770.000,000					0	
3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk SIL, P/LI, B/LI dan P/LI Kawasan Kabupaten/Kota								770.000,000					0	
3	31	04	2.01	01	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIIN)	Persentase industri kecil yang dibareng dan diberikan bantuan produksi (%)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIIN)	Persentase kelompok ahli profesi yang dibareng dan diberikan bantuan produksi		90 %	2 Dokumen	90 %	250.000,000			Persentase industri kecil yang dibareng dan diberikan bantuan produksi (%)	90 %	0
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota keada Silnas	Persentase industri kecil yang dibareng dan diberikan bantuan produksi (%)	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui Silnas	Persentase kelompok ahli profesi yang dibareng dan diberikan bantuan produksi		90 %	1 Dokumen	90 %	28.000,000			Persentase industri kecil yang dibareng dan diberikan bantuan produksi (%)	90 %	0
TOTAL												11.978.378,791			0			

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan teknis dengan perencanaan pembangunan daerah khususnya sektor industry dan perdagangan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (Stoke Holder) dalam menciptakan Good Government sesuai dengan runtutan paradigma baru, yang pada akhirnya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembet ke bawah sehingga keberpihakan masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan selain menjadi relevan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan, Rencana Kerja juga dapat dijadikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang.

Magetan, Agustus 2022

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Magetan



SUCIPTO S.H., M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660714 199403 1 009